

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aji Firmantoro, Zuhad, 2017, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, The Pinisi Press, Yogyakarta.

Anggraini, Titi, "Perjalanan Panjang Pilkada Aceh", dalam M. Jafar, *et. al.*, 2007, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*, Kemitraan, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.

_____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Paca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, O.S., Eddy, dkk., 2009, "Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum," *Laporan Penelitian*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Hiariej, O.S., Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung.

Hendratno, Edi Toet, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta.

Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Huda, Ni'matul & Nazriyah, R., 2011, *Teori Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusamedia, Bandung.

Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.

_____, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

_____, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Indrati S., Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Kelsen, Hans, 2015, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

M., Sri Soemantri, 1997, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Manan, Abdul, 2013, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Manan, Bagir, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

_____, 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Mustafa, Bachsan 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

MD., Mahfud, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta.

Prodjodikoro, R. Wirjono., 1993, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.

Purbacaraka, Purnadi, dan Soekanto, Soerjono, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

_____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wiyasa, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.

Ridwan, Juniarso, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.

Saleh, *et. al.*, 2016, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sesung, Rusdianto, 2013, *Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sulaiman, King Faisal, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.

_____, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Surbakti, Ramlan, *et. al.*, *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Syarif, Amiroeddin, 1987, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Rajawali Press, Jakarta.

Artikel Jurnal

- Afdhal, "Analisis Strategi Partai Aceh pada Pemilu 2012," *Jurnal Politeia*, Vol. 6, No. 1, Januari, 2014.
- Ari Purwadi, "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah," *Jurnal Perspektif*, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013.
- Ferzi Falevi dan Zainal Abidin, "Implikasi Proses Rekrutmen Terhadap Independensi Panwaslih Aceh dalam Pilkada Tahun 2017 di Provinsi Aceh (Suatu Kajian tentang Proses Rekrutmen Panwaslih Aceh dalam Independensi di Provinsi Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 2, Nomor 2, Mei, 2017.
- Coser, Lewis A., 1956, "The Function of Social Conflict," Free Press, New York.
- Fuadi, "Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh," *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
- Fadjri Alihar, "Disparitas Regional dan Konflik Pilkada Aceh 2012," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 2, 2012.
- Kusnu Goseniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum*, No. 27 Vol. 11 September 2004.
- Moch. Nurhasim, "Dominasi Partai Aceh Pasca MoU Helsinki," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 2, 2012.
- Nurrahmawati, Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Peserta Pemilu: (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017), *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Juli-September 2017.
- Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015.
- Suadi Zainal, "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi," *Jurnal Sosiologi*, Vol. 21, No. 1, Januari.
- Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pengesahan RUU Tentang Pemilu," *Majalah Info Singkat Hukum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. IX, No. 09 Mei 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 7, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31).

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005, (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2006 Nomor 7, dan Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 07).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, dan Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07).

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05, dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81).

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-XI/2013 tentang Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

A. Hamid S. Atamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, *Disertasi*, Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Anisha Putri Andini, “Politik Hukum Pengaturan Syari’at Islam pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Analisis Perbandingan *Memorandum Of Understanding* Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Fachrurrazi, “Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Lembaga Pemilu di Daerah Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di Nanggroe Aceh Darussalam”, *Skripsi*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2010.

M. Chandra Rizqi, “Politik Hukum Judicial Review Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tnetnag Pemerintahan Aceh (Sebuah Studi Hukum Mengenai Kekisruhan Pemilukada Aceh 2012)”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

Dokumen-Dokumen Lain

Asqalani, "Integritas Penyelenggara Pemilu di Aceh," *Analisis Situasi Jaringan Survey Inisiatif*, Edisi Tahun 2017.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, Masa Persidangan III, Tahun 2005-2006.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu*, Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2016-2017.

Jaringan Survei Inisiatif, "Pro Kontra Tafsir Regulasi Penyelenggaraan Pilkada Aceh, Kajian Potensi Konflik Dualisme Regulasi pada Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Aceh Tahun 2017," *Analisis Situasi*, Edisi 02 Desember 2015.

Kementerian Dalam Negeri, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jakarta.

L.M. Gandhi, 1995, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif," *Makalah*, Pidato disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1995.

Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Yayasan Perludem, Jakarta.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku V Pemilihan Umum.

Artikel dan Berita Online

Aidil Saputra, "Pencabutan Dua Pasal UUPA dalam UU Pemilu Memangkas Kekhususan Aceh,"
<https://www.kanalaceh.com/2017/08/22/pencabutan-dua-pasal-uupa-dalam-uu-pemilu-memangkas-kekhususan-aceh/>, diakses pada 08/06/2018.

Amrizal J. Prang, "Kesaktian UUPA",
<http://aceh.tribunnews.com/2018/01/16/kesaktian-uupa>, diakses pada tanggal 02/05/2018.

Andhika Prasetya, “Novanto Sahkan UU Pemilu dengan Presidential Threshold 20%,” https://news.detik.com/berita/d-3568003/novanto-sahkan-uu-pemilu-dengan-presidential-threshold-20%, diakses pada tanggal 27 Maret 2018.

Azhari Usman, “Akui Mekanisme Pencabutan Dua Pasal UUPA Tidak Dilakukan Mendagri,” <http://modusaceh.co/news/akui-mekanisme-pencabutan-dua-pasal-uupa-tidak-dilakukan-mendagri-minta-maaf/index.html>, diakses pada 03/04/2018.

Azhari Usman, “Pencabutan UUPA Tidak Ada Konsultasi dengan DPR Aceh,” <http://modusaceh.co/news/pencabutan-uupa-tidak-ada-konsultasi-dengan-dpr-aceh/index.html>, diakses pada 03/04/2018.

Datuk Haris Molana, “Cage Sesalkan Putusan MK Kabulkan Permohonan Abdullah Puteh,” <http://portalsatu.com/read/news/cage-sesalkan-putusan-mk-kabulkan-permohonan-abdullah-puteh-17005>, diakses pada tanggal 30/04/2018.

Fauzie Hasibuan, “Harmonisasi Hukum”, <https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/harmonisasi-hukum/>, diakses pada 8/03/18.

Ihsanuddin, “Jokowi Teken UU Pemilu”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/19/13405771/jokowi-teken-uu-pemilu->, diakses pada tanggal 27 Maret 2018.

Indah Mutiara Kamil, “Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu,” <https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018.

Irwan, “Bawaslu Gelar Rakor Selesaikan Masalah Pengawas Pemilu di Aceh,” <http://bawaslu.go.id/en/node/2143>, diakses pada tanggal 11/04/2018.

M Fajarli Iqbal, “Fachrul Razi: Pencabutan Dua Pasal UUPA Tindakan Inkonstitusional”, <http://portalsatu.com/read/news/fachrul-razi-pencabutan-dua-pasal-uupa-tindakan-inskonstitusional-32325>, diakses pada tanggal 16/12/17.

Masrizal, “Dinilai Langgar Kode Etik, DKKP Beri Sanksi untuk Anggota KIP Aceh,” <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/12/dinilai-langgar-kode-etik-dkpp-beri-sanksi-untuk-anggota-kip-aceh>, diakses pada tanggal 11/04/2018.

Mawardi Ismail, “Menyelamatkan UUPA, Bagaimana Caranya?,” <http://aceh.tribunnews.com/2016/10/06/menyelamatkan-uupa-bagaimana-caranya>, diakses pada tanggal 30 April 2018.

Nabilla Tashandra, “Lucunya Drama Rapat Paripurna Pengesahan UU Pemilu,” <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/22/05400051/lucunya-drama-rapat-paripurna-pengesahan-uu-pemilu->, diakses pada 27 Maret 2018.

Sarina, “Nasir Djamil Sarankan UUPA Direvisi,” <https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/07/25/nasir-djamil-sarankan-uupa-direvisi#sthash.nTqtbre1.dpbs>, diakses pada 08/06/2018.

Serambinews.com, “Mendagri: Perubahan Dua Pasal UUPA Sudah Dikonsultasikan,” <http://aceh.tribunnews.com/2017/09/26/mendagri-perubahan-dua-pasal-uupa-sudah-dikonsultasikan>, diakses pada tanggal 03/04/2018.

Serambinews.com, “Seharusnya MK Tak Bisa Gugurkan UUPA,” <http://aceh.tribunnews.com/2016/08/30/seharusnya-mk-tak-bisa-gugurkan-uupa>, diakses pada tanggal 30/04/2018.

Subur Dani, “Ini Isi Surat Permohonan Maaf Mendagri ke DPRA,” <http://aceh.tribunnews.com/2017/10/11/ini-isi-surat-permohonan-maaf-mendagri-ke-dpra>, diakses pada tanggal 03/04/2018.

Zahlul Pasha, “Merawat MoU Helsinki dan Merevisi UUPA,” <http://aceh.tribunnews.com/2017/08/15/merawat-mou-helsinki-dan-merevisi-uupa>, diakses pada 17/11/2017.